



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**DINAS SOSIAL**

**RENCANA KERJA**  
**(RENJA) TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD

Renja Dinas Sosial merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ranai, 25 Agustus 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



**PURYANTI, SP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
	1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU.....</b>	<b>8</b>
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	14
	2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	15
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	16
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>17</b>
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	17
	3.2 Tujuan dan Sasaran.....	22
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANAGKAT DAERAH.....</b>	<b>30</b>
	4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	30
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>39</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.;

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial merupakan penjabaran Renstra Dinas Sosial yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Dinas Sosial memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Dinas Sosial Mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

### **1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Persiapan Penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

### **2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah**

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial meliputi:

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Dinas Sosial mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;

- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

### **3. Forum Perangkat Daerah**

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Dinas Sosial dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

### **4. Penetapan Renja SKPD**

Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Sosial yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Renja Dinas Sosial memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Dinas Sosial, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2020 - 2024. Renja Dinas Sosial selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61

Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66);

17. Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 26);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2024 sebagai berikut:

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Sosial ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

#### **2. Tujuan**

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Sosial ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2024;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2024 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2024, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2024
- Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Dinas Sosial Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp.7.574.261.735,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.519.786.528,00 atau sebesar 86,08%, dan realisasi fisik sebesar 100%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**b. Program Pemberdayaan Sosial**

- 1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

**c. Program Rehabilitasi Sosial**

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
  - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
  - Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

**d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- 1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

**e. Program Penanganan Bencana**

- 1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

## **f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

1) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional  
Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional  
Kabupaten/Kota

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial. Capaian Renstra secara umum telah berjalan dengan baik, dengan capaian pada seluruh kegiatan telah mencapai 100 persen, bahkan sebagian diantaranya telah melebihi target kinerja maupun anggaran yang direncanakan dalam Renstra.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2024 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2022 terlihat pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial pada Tahun 2022**

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12 x100		14=6+12		15=14/5x100				
					K	RP	K	RP	K	RP Renja	K	RP DPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1.06.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial		
1.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NILAI LAPORAN LK/TP	NILAI	80.05	20,022,196,000			78.80	4,471,961,888	78.80	7,574,261,735	80,61	900,154,062	80,61	2,200,200,384	80,61	3,260,534,358	80,61	6,519,786,528	80,61	6,519,786,528	102,30	86,08	81	6,519,786,528	101	32,56	Dinas Sosial
1.06.01.2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	291,050,000			100	58,210,000	100	27,634,595	100	986,000	100	16,340,512	100	19,651,611	100	24,682,308	100	24,682,308	89,32	100	100	24,682,308	100	8,48	Dinas Sosial
1.06.01.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	291,050,000			2	58,210,000	2	27,634,595	2	986,000	2	16,340,512	2	19,651,611	2	24,682,308	2	24,682,308	100	89,32	2	24,682,308	17	8,48	Dinas Sosial
1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu	1	15,199,100,000			1	3,039,820,888	1	2,729,881,076	1	616,653,041	1	1,209,660,797	1	1,935,141,428	1	2,668,766,933	1	2,668,766,933	100	97,76	1	2,668,766,933	100	17,56	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	19	15,199,100,000			18	3,039,820,888	19	2,729,881,076	19	616,653,041	19	1,209,660,797	19	1,935,141,428	19	2,668,766,933	19	2,668,766,933	100	97,76	19	2,668,766,933	100	17,56	Dinas Sosial
1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	75	2,141,046,000			75	654,731,000	75	490,317,841	75	92,754,600	75	145,095,367	75	222,831,385	75	411,285,838	75	411,285,838	100	83,88	75	411,285,838	100	19,21	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.02		Penyediaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	240,000,000			1	255,500,000	6	213,704,000	1	73,604,000	1	76,604,000	1	82,857,831	8	193,091,831	8	193,091,831	133,33	90,35	8	193,091,831	800	80,45	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.03		Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	108,000,000			1	8,000,000	1	52,583,250	1	5,729,000	1	14,744,250	1	28,832,250	1	37,072,500	1	37,072,500	100	70,50	1	37,072,500	100	34,33	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	58,800,000			1	10,800,000	1	12,538,000	1	3,060,000	1	3,324,000	1	6,228,000	1	9,580,000	1	9,580,000	100	76,41	1	9,580,000	100	16,29	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	164,832,000			3	32,966,400	3	21,347,290	3	3,541,600	3	7,129,600	3	11,416,300	3	16,442,000	3	16,442,000	100	77,02	3	16,442,000	100	9,98	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	60,000,000			1	12,000,000	1	12,000,000	1	0	1	0	1	5,250,000	1	10,050,000	1	10,050,000	100	83,75	1	10,050,000	100	16,75	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.07		Penyediaan Bahan (Material)	Jumlah Paket Bahan (Material) yang Disediakan	Paket	1	80,354,000			1	40,354,000	1	38,546,301	1	6,820,000	1	18,760,000	1	29,232,000	1	34,246,000	1	34,246,000	100	88,84	1	34,246,000	100	42,62	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.09		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	1,429,060,000			48	295,110,600	48	139,599,000	0	0	15	24,533,517	31	59,015,004	60	110,803,507	60	110,803,507	125	79,37	60	110,803,507	214	7,75	Dinas Sosial

1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase	70	875,000,000	-	50	450,000,000	50	414,186,000	0	-	49.66	413,657,250	49.66	414,186,000	49.66	414,186,000	49.66	414,186,000	99.32	100.00	50	414,186,000	71	47.34	Dinas Sosial
1.06.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	875,000,000		1	450,000,000	1	414,186,000	0		1	413,657,250	1	414,186,000	1	414,186,000	1	414,186,000	100	100.00	1	414,186,000	100	47.34	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan pemerintahan	Persentase	80	1,189,000,000	-	80	239,000,000	80	230,382,406	80	50,156,921	80	102,734,914	80	161,234,202	80	216,008,814	80	216,008,814	100	93.76	80	216,008,814	100	18.17	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	34,000,000		1	8,000,000	1	28,378,406	1	1,620,000	1	8,120,302	1	14,305,591	1	21,621,130	1	21,621,130	100	76.19	1	21,621,130	100	63.59	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,155,000,000		12	231,000,000	12	202,004,000	3	48,536,921	6	94,614,612	9	146,928,611	12	194,387,684	12	194,387,684	100	96.23	12	194,387,684	100	16.83	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan	Persentase	75	327,000,000	-	70	30,200,000	75	34,804,232	75	4,431,500	75.00	10,267,784	75	20,226,548	75	28,718,131	75	28,718,131	100	82.51	75	28,718,131	100	8.78	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Dibayar Pajak dan Perbaikannya	Unit	2	121,000,000		2	24,200,000	2	28,804,232	2	3,831,500	2	8,367,784	2	15,426,548	2	22,768,131	2	22,768,131	100	79.04	2	22,768,131	100	18.82	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	Unit	30	206,000,000		4	6,000,000	4	6,000,000	3	600,000	3	1,900,000	3	4,800,000	3	5,950,000	3	5,950,000	75	99.17	3	5,950,000	10	2.89	Dinas Sosial
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persentase	50	800,000,000	-	40	200,000,000	40	132,978,661	0	499,000	40	4,232,012	40	7,031,771	40	90,159,671	40	90,159,671	100	67.80	40	90,159,671	80	11.27	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.01.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	Jumlah PSKS	6	800,000,000	-	5	200,000,000	5	132,978,661	0	499,000	5	4,232,012	5	7,031,771	5	90,159,671	5	90,159,671	100	67.80	5	90,159,671	83	11.27	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kesejahteraan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kesejahteraan	Orang	50	550,000,000		40	150,000,000	30	108,905,901	0	0	0	3,733,012	0	6,532,771	30	87,940,671	30	87,940,671	100.0	80.75	30	87,940,671	60	15.99	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.05.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pengetahuan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (KKK)	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (KKK) kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	1	250,000,000		1	50,000,000	1	24,072,760	0	499,000	0	499,000	0	499,000	0	2,219,000	0	2,219,000	0	9.22	0	2,219,000	0	0.89	Dinas Sosial
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng di luar panti sosial	Persentase	100	2,671,968,000	-	100	555,000,000	100	577,109,878	100	84,560,000	100	178,066,486	100	306,918,736	100	552,678,336	100	552,678,336	100	95.77	100	552,678,336	100	20.68	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG di luar Panti Sosial yang termasuk kebutuhan dasarnya	Persentase	100	2,201,000,000	-	100	480,000,000	100	577,109,878	100	84,560,000	100	178,066,486	100	306,918,736	100	552,678,336	100	552,678,336	100	95.77	100	552,678,336	100	25.11	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.03.	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	550,000,000		156	150,000,000	21	175,580,878	0	0	5	91,615,486	5	108,467,736	21	163,897,936	21	163,897,936	100	93.35	21	163,897,936	70	29.80	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.05.	Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Mental dan Sosial sesuai Standar	Peserta	50	590,000,000			150,000,000										0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0.00	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta	90	496,000,000		90	80,000,000	90	389,741,000	0	84,560,000	0	86,451,000	0	198,451,000	137	388,780,400	137	388,780,400	152.22	99.75	137	388,780,400	152	78.38	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.11.	Pemberian Pelayanan Penyelesaian Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	36	565,000,000		4	100,000,000	4	11,788,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Dinas Sosial



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Dinas Sosial pada tahun 2022 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 6 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2022, semuanya telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan sosial tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Akhir Rensta (2026)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022		
					Target Kinerja Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	78.28	80.05	78.80	80.61	102.30
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Persen	80	90	80	80	100
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	50	50	50	50	100
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng diluar panti sosial	Persen	100	100	100	100	100
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persen	50.95	59.74	60.49	89.25	147.55
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	100	100	100
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	Persen	100	100	100	100	100

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
  - Masih tingginya masalah sosial masyarakat yang belum tertangani
  - Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan sosial didaerah dan nasional
  - Banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah
  - Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan dalam upaya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan
  - Belum optimalnya pemberdayaan PSKS.
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
  - Adanya perubahan kebijakan dari tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah
  - Kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Kementerian Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah
  - Kurangnya SDM dan personil yang menangani permasalahan sosial secara khusus

c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- Adanya dukungan Program dan Anggaran baik dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong program percepatan pengentasan kemiskinan di daerah khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.
- Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam hal perlindungan dan jaminan sosial
- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dasar

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- Masih tingginya masalah kesejahteraan sosial
- Belum optimalnya pemberdayaan PSKS
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung PPKS

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2022, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020–2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005–2025. RPJMN 2020–2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2020–2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ;

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry,

kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah,
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan Karakter Bangsa;

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- 2) Memajukan kebudayaan;
- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dan
- 5) Meningkatkan budaya literasi

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien dan
- 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup,

serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
  - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2024, antara lain meliputi:

- a. Kemiskinan;
- b. Lapangan Kerja;
- c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. Industri;

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka fokus pembangunan diarahkan untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,7 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5–5,7 persen;
3. Tingkat Kemiskinan 6,5–7,5 persen;
4. Rasio Gini 0,375–0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,99–74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27 persen;
7. Nilai Tukar Petani 105–108;
8. Nilai Tukar Nelayan 107–110.

Sebagai RKP tahun kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2024 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu:

- (1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- (3) Penguatan Daya Saing Usaha;
- (4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- (5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- (6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- (7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- (8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional ”**.

Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2024 mempunyai prioritas yaitu:

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah, diantaranya, peningkatan PDRB sektor konstruksi, industri pengolahan dan sektor perdagangan. Kemudian, peningkatan pemanfaatan sektor pertanian dan peningkatan PAD;
2. Pembangunan infrastruktur wilayah. Diantaranya, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan antar pulau dan pesisir;
3. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya. Diantaranya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, manajemen ASN yang profesional, mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta harmonisasi antar umat dan beragama. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2024 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Dukung dengan Akselerasi Kualitas Sumber Daya Manusia”**.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Natuna mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam urusan bidang sosial yang mengarah pada pencapaian prioritas pembangunan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Sosial merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan

keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Misi 2 : Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
<b>Misi 6 : Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2024**  
**Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran 2024	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2024
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	51,13	Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	50
					Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Diluar Panti Sosial	Persen	100
					Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persen	59,84
					Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya	Persen	100
					Pengelolaa Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlwan yang Dikelola	Persen	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran 2024	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2024
Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	79,50	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79,50
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,48	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Nilai	85

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada Urusan Sosial yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026,
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Sosial Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025).

**FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.358.813.971,00							5.621.761.000,00	
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						5.358.813.971,00							5.621.761.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Laporan LKJIP (Nilai)</i>  <i>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP (%)</i>				79.50  85	4.228.813.971,00							4.366.761.000,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>					58.210.000,00	(KAB. NATUNA)					100	58.210.000,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>  <i>Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>		2	2	2  2	58.210.000,00  58.210.000,00	(KAB. NATUNA)  (Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					2	58.210.000,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Tepat Waktu)</i>					3.039.820.000,00	(KAB. NATUNA)					1	3.039.820.000,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>  <i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)</i>		19	19	19  19	3.039.820.000,00  3.039.820.000,00	(KAB. NATUNA)  (Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					19	3.039.820.000,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase aparatur yang bersertifikasi (%)</i>					45.000.000,00	(KAB. NATUNA)					22	60.000.000,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>  <i>Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dan Perjalanan Dinas Biasa (Orang)</i>		0	2	3  3	45.000.000,00  45.000.000,00	(KAB. NATUNA)  (Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					4	60.000.000,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran (%)</i>					465.883.971,00	(KAB. NATUNA)					75	437.231.000,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>  <i>Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Alat dan Bahan Kebersihan (Paket)</i>		1	1	1  1	48.000.000,00  48.000.000,00	(KAB. NATUNA)  (KAB. NATUNA)					1	48.000.000,00	Dinas Sosial
									(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Belanja Peralatan Rumah Tangga (Piring, gelas, sendok, tisu, gayung, keset kaki dan lainnya) (Paket)		1	1	1	25.000.000,00	(KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	1	25.000.000,00	Dinas Sosial
							1	25.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)				-			
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Belanja bahan-bahan (gula, kopi, teh, beras dan lainnya) (Paket)		1	1	1	12.000.000,00	(KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	1	12.000.000,00	Dinas Sosial
							1	12.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)				-			
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Belanja Spanduk, Belanja Penggandaan dan Belanja Cetak (Paket)		4	3	3	32.966.400,00	(KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	4	32.966.000,00	Dinas Sosial
							3	32.966.400,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)				-			
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Belanja Surat Kabar/Majalah (Dokumen)		1	1	1	12.000.000,00	(KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	1	12.000.000,00	Dinas Sosial
							1	12.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)				-			
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Belanja obat-obatan dan lainnya (Paket)				1	10.000.000,00	(KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-			Dinas Sosial
							1	10.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)				-			
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rutin Kantor (Laporan)		60	28	28	295.917.571,00	(KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	28	307.265.000,00	Dinas Sosial
							6	10.800.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)				-			
							20	285.117.571,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)				-			
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)				6	30.000.000,00	(KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-			Dinas Sosial
							6	30.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)				-			
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah (%)					60	250.700.000,00	(KAB. NATUNA)				-	65	427.500.000,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua (Unit)		1	1	1	35.000.000,00	(KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	1	100.000.000,00	Dinas Sosial
							1	35.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)				-			
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			0	3	6	63.600.000,00	(KAB. NATUNA)				-	15	105.900.000,00	Dinas Sosial
							6	63.600.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)				-			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.06.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet (Unit)				4	16.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
			Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (Unit)				5	10.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
			Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Pintu Sliding Kaca (Unit)				3	15.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
			Belanja Modal Pengadaan Lemari Kayu (Unit)				1	9.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
			Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (Unit)				2	3.600.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
			Belanja Modal Pengadaan Meja Resepsionis (Unit)				1	10.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
										142.500.000,00	(KAB. NATUNA)					-		212.000.000,00	Dinas Sosial
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	6	9		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)				-	9		
						Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan (AC Split 2 PK) (Unit)				1	12.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-			
						Belanja Modal Pengadaan Camera Digital (Unit)				1	20.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-			
1.06.01.2.07.0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC (Unit)				1	18.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
			Belanja Modal Pengadaan Laptop (Unit)				3	49.500.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
			Belanja Modal Pengadaan Mesin Scan Dokumen (Unit)				1	7.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
			Belanja Modal Pengadaan Mesin Tebas Rumpuk (Unit)				1	3.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
			Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas (Unit)				1	4.500.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
			Belanja Modal Pengadaan Printer (Unit)				4	16.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
			Belanja Modal Pengadaan UPS (Unit)				5	12.500.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
										9.600.000,00	(KAB. NATUNA)					-		9.600.000,00	Dinas Sosial
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	1	4		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)				-	4		
						Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih (Buah)				2	600.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-			
			Belanja Modal Pengadaan Pemotong Kertas (Buah)				1	2.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
			Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera (Unit)				1	3.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
			Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera Dalam Ruangan/Pataka (Buah)				2	4.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						
1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						238.000.000,00	(KAB. NATUNA)						238.000.000,00	Dinas Sosial			
			Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran (%)				70		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					75					
1.06.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000.000,00	(KAB. NATUNA)						6.000.000,00	Dinas Sosial			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	1	1		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					1					
			Belanja Materai (Laporan)				1	6.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0	1	1	1.000.000,00	(KAB. NATUNA)				-	1	1.000.000,00	Dinas Sosial
			Pembayaran tagihan air (Laporan)				1	1.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-			
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	5	12	231.000.000,00	(KAB. NATUNA)				-	12	231.000.000,00	Dinas Sosial
			Belanja jasa tenaga administrasi (pembayaran gaji PTT) (Laporan)				12	231.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-			
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran (%)				75	131.200.000,00	(KAB. NATUNA)				-	75	106.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				2	25.200.000,00	(KAB. NATUNA)				-			Dinas Sosial
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan dan pembayaran pajak/perizinan (Unit)				2	25.200.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-			
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0	4	5	6.000.000,00	(KAB. NATUNA)				-	5	6.000.000,00	Dinas Sosial
			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)				5	6.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-			
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0	0	1	50.000.000,00	(KAB. NATUNA)				-	1	50.000.000,00	Dinas Sosial
			Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Unit)				1	50.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-			
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		3	5	5	50.000.000,00	(KAB. NATUNA)				-	5	50.000.000,00	Dinas Sosial
			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Rehab WC, Ruangan dan lainnya) (Unit)				5	50.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-			
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial (%)				50	50.000.000,00				Peningkatan Ekonomi Daerah	-		50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan (Organisasi Sosial)				6	50.000.000,00	(KAB. NATUNA)				-	6	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						50.000.000,00	(KAB. NATUNA)				-		50.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)  Pelaksanaan Sertifikasi bagi Sumber Daya Manusia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) (Sertifikat)		0	1	1		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					1		
							1	50.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-		
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						530.000.000,00				Peningkatan Ekonomi Daerah			680.000.000,00	Dinas Sosial
			Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial (%)				100									
			Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (%)				100									
1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						480.000.000,00	(KAB. NATUNA)						630.000.000,00	Dinas Sosial
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)				100		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					100		
1.06.04.2.01.0001		Penyediaan Permakanan			0	0	15	50.000.000,00	(KAB. NATUNA)						50.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				15		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					20		
			Penyediaan Permakanan sesuai standar gizi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (Orang)				15	50.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-		
1.06.04.2.01.0002		Penyediaan Sandang			0,00	0,00	10	30.000.000,00	(KAB. NATUNA)						30.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				10		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					10		
			Penyediaan Pakaian dan kelengkapan lainnya bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Orang)				10	30.000.000,00	(-, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-		
1.06.04.2.01.0003		Penyediaan Alat Bantu						150.000.000,00	(KAB. NATUNA)						150.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		21	30	30		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					30		
			Pemberian alat bantu dan alat bantu peraga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Orang)				30	150.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-		
1.06.04.2.01.0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			0	0	50	50.000.000,00	(KAB. NATUNA)						120.000.000,00	Dinas Sosial
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				50		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					50		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.06.04.2.01.0006		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Orang)				50	50.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-			
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			137	0	50	50.000.000,00	(KAB. NATUNA)					-	80.000.000,00	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (Orang)					90	50.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-	90	
1.06.04.2.01.0011		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0	2	5	50.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)				-	5	100.000.000,00	Dinas Sosial
			Belanja transportasi/pemulangan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Orang)					5	50.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-		
1.06.04.2.01.0012		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0	5	5	100.000.000,00	(KAB. NATUNA)				-	5	100.000.000,00	Dinas Sosial
			Pelayanan Rujukan dan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (Orang)					5	100.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-		
1.06.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang direhabilitasi (%)					100	50.000.000,00	(KAB. NATUNA)				-	100	50.000.000,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0001		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0	0	25	50.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)				-	30	50.000.000,00	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan data dan pengaduan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Orang)					25	50.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				-		
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS (%)					59.84	250.000.000,00					-	250.000.000,00	Dinas Sosial	
1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (%)					71.42	250.000.000,00	(KAB. NATUNA)				-	77.92	250.000.000,00	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0003		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							150.000.000,00	(KAB. NATUNA)				-		150.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)  Pelaksanaan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Keluarga)  Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)  Pembinaan dan Pemberian Bantuan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Orang)		9641	2675	2675		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					2675		
							2.675	150.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
								100.000.000,00	(KAB. NATUNA)						100.000.000,00	Dinas Sosial
					0	20	50		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					50		
							50	100.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya Dasarnya (%)					250.000.000,00				Pembangunan Infrastruktur Wilayah			225.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						150.000.000,00	(KAB. NATUNA)						150.000.000,00	Dinas Sosial
									(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					100		
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosia (%)					50.000.000,00	(KAB. NATUNA)						50.000.000,00	Dinas Sosial
					3116	1875			(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					0.00		
							0	50.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)  Pemberian Permakanaan 3x1 Hari bagi korban bencana alam dan sosial (Orang)					50.000.000,00	(KAB. NATUNA)						50.000.000,00	Dinas Sosial
					0	0.00			(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					0.00		
							0	50.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)  Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		0.00	0.00		50.000.000,00	(KAB. NATUNA)					0.00	50.000.000,00	Dinas Sosial
									(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)							
							0	50.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						100.000.000,00	(KAB. NATUNA)						75.000.000,00	Dinas Sosial
									(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					1		
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana (Desa)					100.000.000,00	(KAB. NATUNA)						75.000.000,00	Dinas Sosial
					1	1	1		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					1		
							1	100.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						50.000.000,00				Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola (%)				100										
1.06.07.2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						50.000.000,00	(KAB. NATUNA)						50.000.000,00	Dinas Sosial	
			Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (%)				100		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					100			
1.06.07.2.01.0002		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						50.000.000,00	(KAB. NATUNA)						50.000.000,00	Dinas Sosial	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)		11	11	11		(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)					11			
			Pemeliharaan Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)				11	50.000.000,00	(Bunguran Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
<b>J U M L A H</b>															5.621.761.000,00		
								5.358.813.971,00									



## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan urusan sosial yang bermanfaat guna mendukung pencapaian Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Dinas Sosial agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2024 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2024.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Dinas Sosial Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan sosial diharapkan akan lebih

terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan sosial. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2024 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.